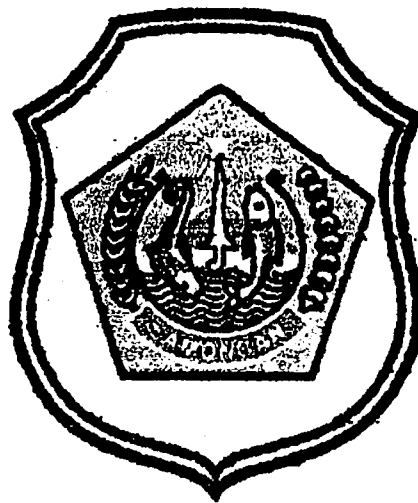


**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Atas Karunia dan Hidayah-Nya kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dapat terselesaikan, Amin.

Laporan ini disusun merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas terhadap kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mencakup evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan visi, misi dan tujuan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

Laporan yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga laporan ini representatif dan lebih baik.

Lamongan , Pebruari 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris,



Ir. ABDUL MUNIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590901 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 13
A. Rencana Strategik	13
1. Visi	13
2. Misi	14
3. Tujuan	15
B. Rencana Kinerja	16
C. Perjanjian Kinerja	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
A. Pengukuran Kinerja	21
B. Evaluasi Kinerja	22
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
D. Akuntabilitas Keuangan	32
 BAB IV PENUTUP	 39
Kesimpulan	39
Saran	39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban Sekretariat DPRD kepada Bupati pemberi wewenang dan mandat tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yang mendeskripsikan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat pelaksanaan yang baik utamanya dalam pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, walaupun masih terdapat beberapa kendala, tetapi untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan dana, sarana dan prasarana yang ada.

Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasarannya, pertama dengan terlaksananya kegiatan rapat-rapat DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Legislasi, maka sasaran peningkatan mutu pelayanan kegiatan rapat-rapat DPRD sudah menunjukkan peningkatan. Kedua dengan terlaksananya kegiatan workshop dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan, maka sasaran peningkatan kualitas kinerja DPRD sudah terlaksana dengan baik. Ketiga dengan terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dalam daerah, koordinasi dan konsultasi serta penjangkaran aspirasi masyarakat, maka sasaran meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan kunker dan penjangkaran aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Keempat dengan terlaksananya penerbitan tabloid Suara Dewan, maka sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kinerja Dewan sudah terlaksana dengan baik.

Sekretariat DPRD telah melaksanakan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2011. Dari keempat hal tersebut maka dampaknya adalah ***"Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas"***.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat Reformasi telah menggugah greget masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun Bangsa dan Negara, baik melalui penjangkaran aspirasi masyarakat maupun unjuk rasa. Hasilnya membuahkan kekuatan yang mewarnai sebagian besar aspek pemerintahan utamanya berdampak pada tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip *good governance*. Masyarakat juga menuntut pemerintahan untuk memberikan perhatian yang serius dalam menentukan kebijakan utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menuju terciptanya pemerintahan yang mampu menyediakan *public good and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

- a) Untuk terselenggaranya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sehingga perlu adanya mekanisme untuk aturan akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas instansi publik serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat.

- Konsep dasar akuntabilitas adalah didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian, masing-masing individu bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan adalah suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang mana mengutamakan pelayanan administrative kepada Anggota Dewan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- Transparansi adalah merupakan fenomena dimana setiap orang atau kelompok berhak mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik secara aktif terhadap : informasi berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang menyangkut kebijakan public, informasi jadwal dan pelaksanaan rapat dan risalah rapat DPRD.
- Partisipasi adalah partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada ketaatan norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu Sekretariat DPRD mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung untuk ikut berpartisipasi aktif secara terbuka dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan melalui kegiatan jaring asmara, kunjungan kerja dalam daerah. Atau bahkan menerima aspirasi masyarakat secara perorangan atau kelompok baik berupa pengaduan atau unjuk rasa.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Peranan Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Kabupaten dan Kota agar lebih efektif, efisien, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Lamongan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

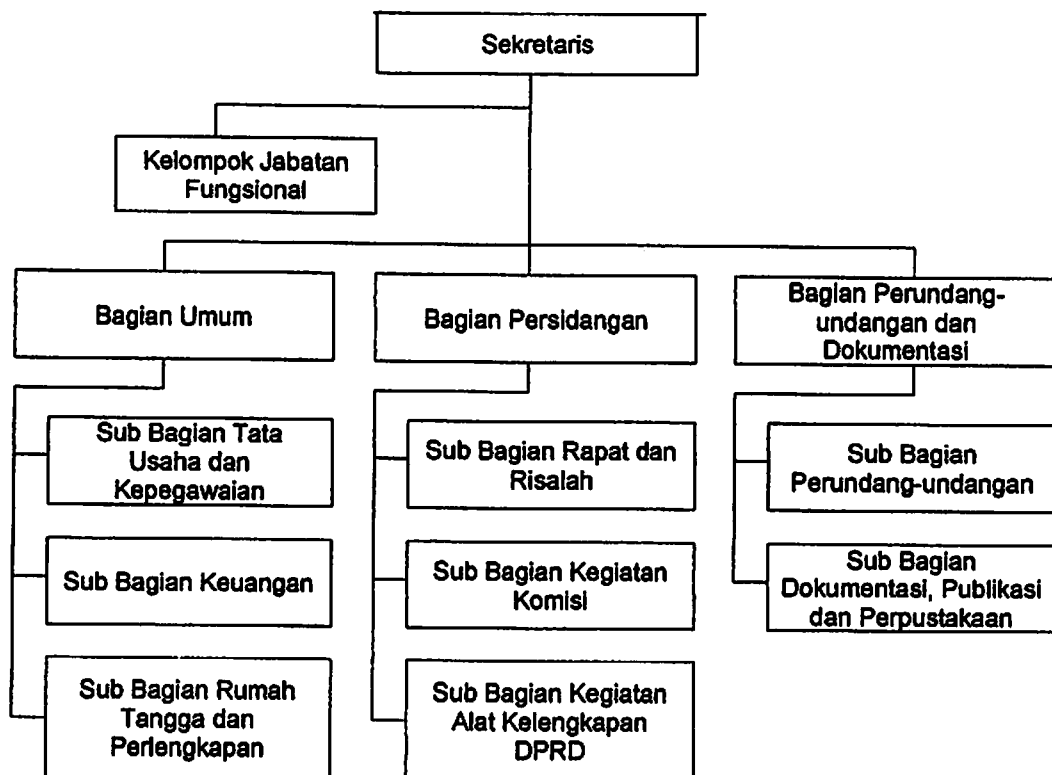
Dimana susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Persidangan;
- d. Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2008
Tanggal : 4 Juni 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



Adapun tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut :

Sekretaris DPRD :

Memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD

Kepala Bagian Umum :

Menyelenggarakan urusan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, Keuangan, Keprotokol, rumah tangga, perlengkapan;

↓ Dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD;
- f. Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- b. Menyiapkan surat dinas, undangan rapat-rapat dan kunjungan kerja;
- c. Melaksanakan penggandaan, distribusi surat-surat dinas, undangan – rapat-rapat dan kunjungan kerja;
- d. Menyelenggarakan administrasi dan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD;

- f. Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas DPRD;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai;
- h. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD serta hak-haknya;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan:

- a. Menyusun rencana dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Pimpinan;
- b. Menyiapkan bahan kebutuhan peralatan akomodasi dan konsumsi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Mengurus kendaraan dinas, mengatur dan menyiapkan pengemudi beserta bahan bakarnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keamanan dan ketertiban gedung DPRD dan rumah dinas Pimpinan;
- e. Melaksanakan pengoperasian peralatan teknik penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- f. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan kebersihan di lingkungan gedung DPRD dan rumah Dinas Pimpinan;
- g. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD;
- h. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dan inventarisasi barang-barang Sekretariat DPRD;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyediakan Cinderamata dalam bentuk Plakat, karangan bunga atau bentuk lainnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Persidangan

Menyelenggarakan pelayanan rapat-rapat DPRD dan administrasi rapat;

✚ Dan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- b. Penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- c. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan dan rencana peninjauan DPRD;
- d. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah :

- a. Menyusun rancangan jadawal rapat-rapat paripurna DPRD;
- b. Menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
- c. Melaksanakan penggandaan dan distribusi bahan-bahan rapat;
- d. Mengatur tata tempat rapat bersama-sama dengan sub bagian terkait;
- e. Menyusun rancangan sambutan jalannya rapat Paripurna untuk Pimpinan DPRD;
- f. Menyusun dan menggandakan risalah rapat-rapat Paripurna DPRD termasuk Dokumen lainnya;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Kegiatan Komisi

- a. Menyiapkan rancangan jadwal kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja/peninjauan Komisi;
- b. Menyiapkan surat-surat yang terkait dengan kegiatan Komisi;
- c. Menyiapkan permohonan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan Komisi;
- d. Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan Komisi;
- e. Menyusun notulen/catatan rapat dan laporan kunjungan kerja/peninjauan Komisi;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan komisi;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

- a. Menyiapkan surat-surat untuk kegiatan Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD;
- b. Menyusun rencana jadwal rapat-rapat, kunjungan kerja/koordinasi dan konsultasi kegiatan Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD;
- c. Menyiapkan dan menggandakan bahan-bahan rapat Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD;
- d. Menyusun notulen hasil rapat Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi

Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk-produk DPRD, melakukan dokumentasi produk-produk hukum, pengadaan publikasi dan menerima informasi masyarakat serta mengelola perpustakaan;

✦ Dan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan Produk DPRD;
- b. Pengumpulan bahan untuk penerbitan majalah, brosur, atau buku tentang kegiatan DPRD;
- c. Pengumpulan produk-produk DPRD untuk Dokumentasi dan mengkliping berita;
- d. Penyiapan dan pemeliharaan produk-produk DPRD serta produk hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- e. Pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi mengenai produk-produk DPRD dan Kegiatan DPRD;
- f. Pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum DPRD;
- b. Menyusun produk hukum DPRD;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- d. Menyimpan semua berkas pengajuan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- e. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan;
- f. Menyebarkan produk-produk hukum DPRD;
- g. Mengagendakan produk-produk hukum DPRD;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan :

- a. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan DPRD;
- b. Mengumpulkan bahan penerbitan majalah, tabloit, pamlet atau buku tentang kegiatan DPRD;
- c. Mencermati berita atau persyaratan yang dimukakan oleh Pimpinan, Anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada Pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tanggapan/tidaklanjut dari DPRD;
- d. Mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan elektronik;
- e. Mendistribusikan hasil dokumentasi dan penerbitan DPRD, kepada lembaga pemerintah dan masyarakat;
- f. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
- g. Mengatur dan mendampingi wartawan media cetak dan media elektronik dalam mendokumentasikan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- h. Membuat laporan hasil kunjungan kerja untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronik;
- i. Menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;
- j. Menghimpun memori dan naskah dinas pidato DPRD;
- k. Menyiapkan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait;
- l. Mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD;
- m. Menyiapkan rencana kebutuhan buku-buku bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan untuk Perpustakaan Sekretariat DPRD;
- n. Membuat daftar dan kode buku-buku perpustakaan Sekretariat DPRD;
- o. Mengumpulkan dan menginventarisasi buku-buku/bahan-bahan pustaka yang berasal dari Dinas/Badan/Lembaga/Instansi Lainnya;
- p. Melaksanakan kerjasama/koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam lingkungan Sekretariat DPRD dan kerja sama dengan bagian Perpustakaan di luar Sekretariat DPRD;

- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat / Golongan yang mana jumlah personil di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebanyak 35 orang. Adapun Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas utamanya Kendaraan Roda 4 (empat), Kendaraan Roda 2 (dua) , Meja dan Kursi , mesin ketik , Komputer , alat komunikasi (Pesawat Telpon) dan sarana yang lainnya .

1. Personil

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD jumlah personil sebanyak 35 orang (per 31 Desember 2011) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan Struktural	Jml.	Pangkat/Gol Ruang	Jml.	Pend. Formal	Jml.	Keterangan
1.	Sekretaris	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2.	Kepala Bagian	3	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	S2	2	
			Pembina (IV/a)	1	S2	1	
3.	Kasubbag.	6	Penata Tk.I (III/d)	2	S1	2	
			Penata (III/c)	4	S1	3	

					SLTA	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	2	S1	2	
4.	Staf	25	Penata (III/c)	2	S1	2	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	7	S1	7	
			Penata muda (III/a)	6	S1	6	
			Pengatur Tk.I (II/d)	2	SLTA	2	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	SLTA	1	
				3	S1	3	Tenaga Kontrak
				1	SLTA	1	
				1	SD	1	
	Jumlah total	35	Jumlah total	35	Jml.total	35	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dari pembiayaan baik melalui APBN / APBD yang berorientasi pada pelayanan kegiatan DPRD.

Sehubungan dengan pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mencakup : Pernyataan visi, misi dan rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian kegiatan serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2006-2010.

A. RENCANA STRATEJIK

Secara Umum Rencana Stratejik Sekretariat DPRD memuat kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan, yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas, melalui pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

1. Visi

"Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas"

Penjelasan Visi :

Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arah dan fokus strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD yaitu rapat-rapat, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan administratif dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan berhasil.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD telah menyusun misi sebagai berikut :

Misi 1

"Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD"

Penjelasan Misi 1

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang beorientasi pada peningkatan pelayanan kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan rapat-rapat dalam menentukan kebijakan dan pembahasan Peraturan Daerah; dan mengadakan pelatihan bagi anggota DPRD yang berhubungan dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia.

Misi 2

"Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan pelaksanaan kunjungan kerja dan penjangkaran aspirasi masyarakat"

Penjelasan Misi

Sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu mengoptimalkan mutu pelayanan dan kemudahan pelaksanaan kunjungan kerja baik di dalam maupun ke luar daerah; menjaring aspirasi masyarakat; dan Sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan optimalisasi, penambahan prasarana dan sarana, serta memperlancar kegiatan dengan didukung tertib administrasi.

3. Tujuan.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM berhubungan dengan Sekretariat DPRD adalah : **Meningkatnya kinerja legislatif.**

Untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM, maka Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi, menetapkan tujuan sebagai berikut :

Misi : *Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD*

Tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD
- b. Meningkatkan SDM Anggota DPRD

Misi : *Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan kegiatan kunjungan kerja dan penjangkaran masyarakat.*

Tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kinerja DPRD
- b. Sosialisasi & transparansi kinerja DPRD

Dengan penetapan tujuan tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD dapat berjalan tertib, lancar sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Legislatif.

Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka Sekretariat DPRD menetapkan sasaran sebagai berikut :

Misi 1

- a. Tujuan meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD.

Sasaran yang ditetapkan adalah :

Meningkatnya mutu pelayanan kegiatan rapat-rapat

b. Tujuan meningkatkan SDM Anggota DPRD

Sasaran yang ditetapkan :

Meningkatnya kualitas kinerja DPRD

Misi 2

a. Tujuan meningkatkan kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kinerja DPRD.

Sasaran yang ditetapkan adalah :

Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan kunjungan kerja dan penjangkaran aspirasi masyarakat.

b. Tujuan Sosialisasi dan transparasi kinerja DPRD

Sasaran yang ditetapkan :

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kinerja DPRD

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang disusun. Rencana kinerja dilaksanakan sesuai kebijakan anggaran.

Sasaran, kebijakan dan program Sekretariat DPRD yang ditetapkan pada tahun 2010 berdasarkan Renstra tahun 2010-2015 dan mengacu pada Program-program Pembangunan Kabupaten Lamongan berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 (Lampiran II Perda Nomor 2 Tahun 2006) adalah sebagai berikut :

Sasaran : *Meningkatnya mutu pelayanan kegiatan rapat-rapat DPRD*

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kebijakannya adalah : *Peningkatan pemberdayaan aspirasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan Perda*

Kegiatannya adalah :

- ◆ **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**
- ◆ **Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda & Tokoh Masyarakat / Agama**
- ◆ **Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan**
- ◆ **Rapat- rapat Paripurna**

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja DPRD utamanya yang berkaitan dengan pembahasan anggaran. Kegiatan ini memberikan pelayanan optimal yang cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan Panmus/Banmus, Panggar/Banggar, Komisi ABCD, Gabungan Fraksi dan Rapat Pimpinan, Paripurna DPRD;

Sub kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD adalah :

- a. **Pembahasan Perhitungan APBD tahun 2010**
- b. **Pembahasan Perubahan APBD tahun 2011**
- c. **Pembahasan Rancangan APBD 2012**

Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja DPRD utamanya yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pelaksanaan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan optimal yang cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan rapat Panmus, Pansus, Komisi ABCD, Gabungan Fraksi dan Rapat Pimpinan, Paripurna DPRD;

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah :

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Sasaran : *Meningkatnya kualitas kinerja DPRD*

Kebijakannya adalah : *Peningkatan profesionalisme Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.*

Kegiatannya adalah : *Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD*

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD dengan mengadakan workshop sebagai usaha peningkatan profesionalisme Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang ditetapkan adalah :

Pelaksanaan Workshop.

Sasaran : *Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan kunjungan kerja dan penjangkaran aspirasi masyarakat*

Kebijakannya adalah : *Peningkatan kemudahan dan kelancaran urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha*

Kegiatannya adalah :

♦ Kegiatan Reses

♦ Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah

Kegiatan ini pada dasarnya untuk melayani urusan rumah tangga, kunjungan kerja dan administrasi anggota DPRD yang berkaitan dengan Reses (penjangkaran aspirasi masyarakat) dan kunjungan kerja. pelaksanaan utama kegiatan ini adalah menyiapkan persiapan administrasi, akomodasi, sarana dan prasarana untuk Reses dan kunjungan kerja dalam daerah guna peningkatan kualitas informasi sebagai acuan di bidang pemerintahan dan pembangunan; membangun komunikasi dan kemitraan DPRD dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya merupakan perwujudan saluran aspirasi

masyarakat; memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan tetap mengutamakan prioritas permasalahan yang dilandasi prinsip-prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas; serta kegiatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sasaran : *Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang kinerja DPRD*

Kebijakannya adalah : *Peningkatan Informasi bagi masyarakat*

Kegiatannya adalah : *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*

Kegiatan ini pada dasarnya sebagai sarana informasi bagi masyarakat supaya mengetahui, mengerti dan memahami, sekaligus merupakan sosialisasi Peraturan Daerah dan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan kinerja dewan. Pelaksanaan utama kegiatan ini adalah menerbitkan tabloid Suara Dewan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD dan diterbitkan setiap bulan sekali.

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah :

Kehumasan dan Media Cetak.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2011

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2011 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam tahun 2011 dengan beberapa program dan kegiatan

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 dan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2011 Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi (Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD).

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran Kinerja ini ditentukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari Input, output, dan outcome.

Skore yang dipergunakan sebagai pengukuran kinerja dibuat berdasarkan masing-masing kegiatan pada bidang antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nilai 85 – 100 | = Sangat Baik atau Sangat Berhasil |
| 2. Nilai 70 - <85 | = Baik atau Berhasil |
| 3. Nilai 55 - <70 | = Kurang Baik atau Kurang Berhasil |
| 4. Nilai <55 | = Sangat Kurang Baik atau Tidak Berhasil |

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dapat dilihat dari target dan realisasi capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

a) Meningkatnya kecepatan dan tertibnya pelaksanaan pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD :

1. Pembahasan Raperda

Pembahasan Raperda ditetapkan tiga belas (13) Raperda dan ditetapkan menjadi Perda, tercapai 100% (Sesuai Target)

2. Pembahasan Rancangan APBD 2012

Penetapan Raperda tentang Rancangan APBD 2012 dan terlaksananya Raperda tentang Rancangan APBD 2012 menjadi Perda, persetujuan Raperda Rancangan APBD 2012 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah. tercapai 100% (Sesuai Target)

3. Pembahasan Perhitungan APBD 2010

Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang Perhitungan APBD 2010 dan terlaksananya Raperda tentang Perhitungan APBD 2010, persetujuan Raperda Perhitungan APBD 2010 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah. tercapai 100% (Sesuai Target)

4. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2011

Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD 2011 dan terlaksananya Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD 2011, persetujuan Raperda Perubahan APBD tahun 2011 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah. tercapai 100% (Sesuai Target)

5. Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama

Terselesainya dua (2) Kesepakatan dokumen pembahasan Perubahan KUA / PPA 2011 dan pembahasan KUA / PPA 2012, tercapai 100% (Sesuai Target)

6. Rapat – rapat alat Kelengkapan Dewan

Rapat – rapat alat Kelengkapan Dewan tercapai 288 kegiatan sesuai dengan target, tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Rapat Komisi ABCD 96 kali
- Rapat Badan Legislasi 48 kali
- Rapat Badan Kehormatan 48 kali
- Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi 24 kali.
- Rapat Komisi gabungan ABCD 12 kali
- Rapat Komisi ABCD dengan Eksekutif 48 kali
- Rapat alat Kelengkapan Lainnya 12 kali

7. Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan Rapat Paripurna dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama setahun sesuai dengan yang ditargetkan. tercapai 100%

b) Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan Reses/Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Kunjungan Kerja

1. Kegiatan Reses

Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 kali selama setahun. pelaksana Reses adalah Pimpinan dan anggota DPRD di Dapil masing-masing. Dari kegiatan Reses ini didapatkan aspirasi/aduan dari masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 19 (sembilan belas) atau 76 % melebihi target yang

ditentukan di RPJMD sebanyak 70 %, sehingga melebihi target 6 % dan telah dibuat 3 Risalah sesuai target.

2. Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah

Lokasi kegiatan di 27 Kecamatan se wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali selama setahun. Peserta kunjungan kerja semua anggota DPRD, kecuali unsur Pimpinan DPRD sesuai dengan yang ditargetkan. tercapai 100%

c) Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD

Kegiatan Workshop dilaksanakan 9 (sembilan) kali dalam satu tahun, sesuai dengan yang ditargetkan. tercapai 100%

dilaksanakan pada :

1. Tahap pertama 11-13 Pebruari 2011,
2. Tahap kedua 18-20 Maret 2011
3. Tahap ketiga 8-10 April 2011,
4. Tahap keempat 20-22 Mei 2011,
5. Tahap kelima 24-26 Juni 2011,
6. Tahap keenam 22-24 Juli 2011,
7. Tahap ketujuh 9-11 September 2011,
8. Tahap kedelapan 7-9 Oktober 2011,
9. Tahap kesembilan 18-20 November 2011

d) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Perda dan Kinerja DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan :

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kehumasan dan Media cetak). Penyebaran tabloid diperuntukkan bagi Anggota DPRD, Dinas/Instansi, lembaga pendidikan, 27 Kecamatan dan desa se wilayah

Kabupaten Lamongan. Jumlah tabloid 1.500 expl perbulan dan terbit sebanyak 12 kali pertahun sesuai dengan yang ditargetkan. tercapai 100%

e) Meningkatnya Pelayanan Askes Anggota dan Keluarga DPRD

Penyediaan dana premi asuransi disediakan dan dibayarkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Lamongan sejumlah 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Lamongan beserta keluarga dengan jumlah 170 (seratus tujuh puluh) orang, sesuai dengan yang ditargetkan. tercapai 100%

f) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu

Pelaksanaan kegiatan LKPJ Kepala Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

C. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Untuk mengukur kualitatif atau kuantitatif indikator kinerja dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Melalui indikator kinerja dapat digunakan untuk meyakinkan dan perkembangan/kemajuan atau keberhasilan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja punya peranan penting untuk mencapai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mengetahui kelancaran dan tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD melalui misi yang sudah ditetapkan, maka dilaksanakan Analisa Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

Dengan realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dengan membandingkan antara target kinerja dan capaian kinerja tahun 2010 dan 2011 yaitu :

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
		2010	2011	2010	2011	
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	100%	90%	100%	(ditargetkan di RPJMD) Kegiatan Pembahasan Raperda untuk dana capaiannya 98,72%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13,558,800.00 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. kegiatan Pembahasan Raperda, untuk tahun 2011 ditargetkan 100 %.
	- Pembahasan Perhitungan APBD tahun 2010	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Perhitungan APBD tahun 2010 untuk dana capaiannya 100.36% hal ini disebabkan anggaran yang disediakan kurang sebesar Rp. 124,710.00 (Seratus dua Puluh Empat ribu tuju ratus sepuluh rupiah). Mengenai SK persetujuan Raperda Perhitungan APBD tahun 2011 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah.
	- Pembahasan Perubahan APBD tahun 2011	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD 2011 untuk dana capaiannya 104.29%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan kurang sebesar Rp. 1,499,710.00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tuju Ratus Sepuluh Rupiah). Mengenai SK persetujuan Raperda Perubahan APBD tahun 2011 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah.

	- Pembahasan Rancangan APBD tahun 2012	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Pembahasan Rancangan APBD 2011 untuk dana capaiannya 85.31%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5,875,240.00 (Lima juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Empat Puluh Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Mengenai SK persetujuan Raperda dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah.
2.	Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama untuk dana capaiannya 75.63%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14,518,000.00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah.
3.	Rapat – rapat alat Kelengkapan Dewan	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan untuk dana capaiannya 92.46%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7,700,000.00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan dilaksanakan sesuai yang ditargetkan sebanyak 288 kali selama setahun dengan rincian: - Rapat Komisi ABCD 96 kali - Rapat Badan Legislasi 48 kali - Rapat Badan Kehormatan 48 kali - Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi 24 kali.

							- Rapat Komisi gabungan ABCD 12 kali - Rapat Komisi ABCD dengan Eksekutif 48 kali - Rapat alat Kelengkapan Lainnya 12 kali - Rapat Pimpinan dan Lainnya 54 kali.
4. Rapat-rapat Paripurna			100%	100%	100%	100%	Kegiatan Rapat Paripurna untuk dana capaiannya 65,51%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 59,026,300.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga ratus Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Kegiatan Rapat Paripurna dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama setahun, sesuai dengan yang ditargetkan.
5. Kegiatan Reses			100%	100%	100%	100%	(ditargetkan di RPJMD) Kegiatan Reses untuk dana capaiannya 99,99 %, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.288,000.00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 kali selama setahun. pelaksana Reses adalah Pimpinan dan anggota DPRD di Dapil masing-masing. Dari kegiatan Reses ini didapatkan aspirasi/aduan dari masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 19 (sembilan belas) atau 76 % melebihi target yang ditentukan di RPJMD sebanyak 70 %, sehingga melebihi target 6 % dan telah dibuat 3 Risalah sesuai target.

6. Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah		100%	100%	100%	100%	Kegiatan Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah untuk dana capaiannya 100 %, anggaran yang disediakan semuanya digunakan sehingga tidak terdapat sisa anggaran untuk disetor kembali ke Kas Daerah, dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target. Lokasi kegiatan di 27 Kecamatan se wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali selama setahun. Peserta kunjungan kerja semua anggota DPRD, kecuali unsur Pimpinan DPRD sesuai dengan yang ditargetkan.
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	1. Workshop Alokasi Dana Desa Sebagai Sarana Pembinaan Konstituen	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Workshop) untuk dana capaiannya 100 %, anggaran yang disediakan semuanya digunakan sehingga tidak terdapat sisa anggaran untuk disetor kembali ke Kas Daerah. Kegiatan Workshop dilaksanakan 9 (sembilan) kali dalam satu tahun, dilaksanakan pada : Tahap pertama 11-13 Pebruari 2011, Tahap kedua 18-20 Maret 2011 Tahap ketiga 8-10 April 2011, Tahap keempat 20-22 Mei 2011, Tahap kelima 24-26 Juni 2011, Tahap keenam 22-24 Juli 2011, Tahap ketujuh 9-11 September 2011,
	2. Workshop Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik Di Era Good Government	100%	100%	100%	100%	
	3. Workshop Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	

	4. Workshop Mengkritisi Politik Anggaran Daerah	100%	100%	100%	100%	Tahap kedelapan 7-9 Oktober 2011, Tahap kesembilan 18-20 November 2011
	5. Workshop Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Era Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	Mengenai jumlah peserta, Seluruh Kegiatan Workshop Tahap I-IX diikuti oleh 50 (lima puluh) Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari 50 anggota yang ada.
	6. Workshop Susunan Pemendagri Nomor 22 tahun 2011	100%	100%	100%	100%	
	7. Workshop Partai Baru, Electoral Treshold, & Masa depan Sistem Multi Partai Serta Sitem Pemilu	100%	100%	100%	100%	
	8. Workshop Mewujudkan APBD Pro Poor dan Responsip Gender	100%	100%	100%	100%	
	9. Workshop Permendagri Nomor 47 Tahun 2011	100%	100%		100%	
8. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Kehumasan dan Media Cetak	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kehumasan dan Media cetak) untuk dana capaiannya 100 %. Penyebaran tabloid diperuntukkan bagi Anggota

									DPRD, Dinas/Instansi, lembaga pendidikan, 27 Kecamatan dan desa se wilayah Kabupaten Lamongan. Jumlah tabloid 1.500 expl perbulan dan terbit sebanyak 12 kali pertahun sesuai dengan yang ditargetkan
9.	Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan untuk dana capaiannya 85,00 % hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27,720,000.00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Penyediaan dana premi asuransi disediakan dan dibayarkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Lamongan sejumlah 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Lamongan beserta keluarga sesuai dengan yang ditargetkan
10	LKPJ Kepala Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan LKPJ Kepala Daerah untuk dana capaiannya 100 %, anggaran yang disediakan semuanya digunakan sehingga tidak terdapat sisa anggaran untuk disetor kembali ke Kas Daerah. Pelaksanaan kegiatan LKPJ Kepala Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dari sampai sejauhmana dalam mengaplikasikan program kerja yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tugasnya telah menunjukkan kesesuaian program kerja. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan rutin belanja, rapat dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD telah dilaksanakan mendekati pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada pelaksanaan kegiatan diatas.

D. Akuntabilitas Keuangan

Evaluasi akuntabilitas keuangan dilakukan mulai dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya.

Berdasarkan hasil analisa akuntabilitas keuangan secara keseluruhan, maka hasil analisa dan evaluasi terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD telah sesuai dengan yang di tetapkan.

Evaluasi proses penganggaran

- Anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana strategis, dan realistis dengan mempertimbangkan tingkat capaian kinerja;
- Rencana pelaksanaan kegiatan keuangan yang diajukan telah terakomodasi pembiayaannya, bahkan jumlah anggaran yang diajukan dalam realisasinya masih terdapat dana yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas daerah;
- Jumlah anggaran yang disetujui telah sesuai dengan yang diperlukan dalam tingkat kinerja yang diinginkan.

Evaluasi pelaksanaan pembiayaan kegiatan

- dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur penerimaan, penyetoran dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan.

Evaluasi pelaporan keuangan

- evaluasi mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan semestinya;
- pelaksanaan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan telah mencakup frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan serta kepentingan laporan.

Untuk mengetahui dana yang dianggarkan dan realisasinya dalam rangka mencapai sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Sumber Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Masalah	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DPRD								
		BELANJA TIDAK LANGSUNG								
		- BELANJA PEGAWAI	100%	APBD	8,516,057,880.00	8,425,057,394.00	91,000,486.00	98.93 %	-	-
		JUMLAH BELANJA DPRD			8,516,057,880.00	8,425,057,394.00	91,000,486.00	98.93 %		
		Sekretariat DPRD								
		BELANJA TIDAK LANGSUNG								
		- BELANJA PEGAWAI	100%	APBD	1,764,249,000.00	1,714,540,794.00	49,708,206.00	97.18 %	-	-
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,764,249,000.00	1,714,540,794.00	49,708,206.00	97.18 %		
1.	Program Pelayanan Adm Perkantoran	BELANJA LANGSUNG								
	a	Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	APBD	2,394,986,645.0 4,044,000.00	2,225,355,319.00 4,044,000.00	169,631,326.00 0.00	92.92 % 100.00 %	-	-
	b	Penyediaan Jasa komunikasi	100%	APBD	175,000,000.00	145,800,794.00	29,199,206.00	83.31 %	-	-
	c	sumber daya air&listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan & perijinan	100%	APBD	32,800,000.00	29,272,500.00	3,527,500.00	89.25 %	-	-
	d	kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100%	APBD	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	100 %	-	-
	e	Penyediaan alat tuliskan kantor	100%	APBD	99,484,440.00	98,915,800.00	568,640.00	99.43 %	-	-
	f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	APBD	146,834,000.00	145,873,000.00	961,000.00	99.35 %	-	-
	g	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan Kantor	100%	APBD	36,575,820.00	36,570,600.00	5,220.00	99.99 %	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		h	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	100%	APBD	11,600,000.00	7,595,000.00	4,005,000.00	65.47 %	-	-
		i	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perund-undangan	100%	APBD	133,710,000.00	127,825,000.00	5,885,000.00	95.60 %	-	-
		j	Penyediaan makan dan minum	100%	APBD	87,330,000.00	81,980,000.00	5,350,000.00	93.87 %	-	-
		k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	APBD	1,526,117,560.00	1,424,195,200.00	101,922,360.00	93.32 %	-	-
		l	Penyediaan Jasa tenaga adm / teknis kegiatan	100%	APBD	69,490,825.00	51,283,425.00	18,207,400.00	73.80 %	-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					838,300,000.00	808,885,500.00	29,414,500.00	96.49 %	-	-
		a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	APBD	20,410,000.00	20,018,000.00	392,000.00	98.08 %	-	-
		b	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100%	APBD	66,950,000.00	64,735,000.00	2,215,000.00	96.69 %	-	-
		c	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	100%	APBD	144,480,000.00	143,660,000.00	820,000.00	99.43 %	-	-
		d	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	100%	APBD	554,020,000.00	528,090,500.00	25,929,500.00	95.32 %	-	-
		e	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor	100%	APBD	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	100 %	-	-
		f	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	100%	APBD	47,640,000.00	47,582,000.00	58,000.00	99.88 %	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					262,883,363.0	257,308,000.00	5,575,363.00	97.88 %	-	-
		a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%	APBD	262,883,363.0	257,308,000.00	5,575,363.00	97.88 %	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan & Capaian Kinerja Keuangan				15,000,000.00	14,844,900.00	155,100.00	98.97 %	-	-
	a	Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	APBD	8,959,200.00	8,924,200.00	35,000.00	99.61 %	-	-
	b	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	100%	APBD	2,440,800.00	2,404,700.00	36,100.00	98.52 %	-	-
	c	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	100%	APBD	3,600,000.00	3,516,000.00	84,000.00	97.67 %	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				6,650,213,620.00	6,527,402,500.00	122,811,120.00	98.15 %	-	-
	a	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	APBD	1,060,373,700.00	1,046,814,900.00	13,558,800.00	98.72 %	-	-
	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	APBD	950,404,480.00	941,096,500.00	9,307,980.00	99.02 %	-	-
	-	Pembahasan Perhitungan APBD Tahun 2009	100%	APBD	34,989,740.00	35,114,450.00	-124,710.00	100.36 %	-	-
	-	Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2010	100%	APBD	34,989,740.00	36,489,450.00	-1,499,710.00	104.29 %	-	-
	-	Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2011	100%	APBD	39,989,740.00	34,114,500.00	5,875,240.00	85.31 %	-	-
	b	Hearing / Dialog Koordinasi dgn pjb. Pemda & Tokoh Masy/Agama	100%	APBD	59,581,000.00	45,063,000.00	14,518,000.00	75.63 %	-	-
	c	Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan	100%	APBD	102,150,000.00	94,450,000.00	7,700,000.00	92.46 %	-	-
	d	Rapat-rapat paripurna	100%	APBD	171,151,300.00	112,125,000.00	59,026,300.00	65.51 %	-	-
	e	Kegiatan reses	100%	APBD	2,171,271,300.00	2,170,983,300.00	288,000.00	99.99 %	-	-
	f	Kunjungan Pimp. & Angg DPRD dalam Daerah	100%	APBD	945,163,200.00	945,163,200.00	0.00	100.00 %	-	-
	g	Peningkatan Kapasitas Pimp. & Angg. DPRD	100%	APBD	1,819,983,600.00	1,819,983,600.00	0.00	100.00 %	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	100%	APBD	111,443,400.00	111,443,400.00	0.00	100.00 %	-	-
		I Penyediaan Dana Premi Asuransi Kesehatan	100%	APBD	184,800,000.00	157,080,000.00	27,720,000.00	85.00 %		
		I LKPJ Kepala Daerah	100%	APBD	24,296,120.00	24,296,100.00	20.00	100.00 %	-	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					10,161,383,628.00	9,833,796,219.00	327,587,409.00	96.78 %		
JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DPRD					11,925,632,628.00	11,548,337,013.00	377,295,615.00	96.84 %		
JUMLAH BELANJA TOTAL					20,441,690,508.00	19,973,394,407.00	468,296,101.00	97.71 %		

Berdasarkan APBD tahun 2011, jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung DPRD sebesar Rp 8,516,057,880.00 yang terealisasi sebesar Rp 8,425,057,394.00 (98.93%) dengan sisa sebesar Rp 91,000,486.00. Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 1,764,249,000.00 yang terealisasi sebesar Rp 1,714,540,794.00 (97.18%) dengan sisa sebesar Rp 49,708,206.00, sedangkan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 10,161,383,628.00 yang terealisasi sebesar Rp 9,833,796,219.00 (96.78%) dengan sisa sebesar Rp 327,587,409.00, keseluruhan sisa anggaran telah dikembalikan ke Kas Daerah. Dari uraian tersebut Sekretariat DPRD berusaha melakukan upaya mengurangi pemborosan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat pelaksanaan yang baik dan lancar utamanya dalam pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, walaupun masih terdapat beberapa kendala, tetapi untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan dana, sarana dan prasarana yang ada.

SARAN

- a. Agar Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD lebih baik, masih diperlukan pegawai yang lebih berdedikasi, dan berkualitas, sayangnya masih sering dijumpai kualitas mereka masih relative kurang representatif telah menyebabkan masalah, terutama tidak berjalannya akuntabilitas, bahkan masih belum menunjang efisiensi dan mendorong motivasi sebagai akibat kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme. Sehingga perlu ditingkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan penjenjangan ketrampilan dengan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah;
- b. Perlu ditingkatkan kedisiplinan, kebersamaan, keterbukaan, dan kejujuran, yang dimulai dari pejabat struktural langsung di atasnya sampai pada staf, sebagai pelaksanaan fungsi pengabdian guna mewujudkan good governance dan otonomi daerah;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagai pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris,


Ir. ABDUL MUNIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590901 198803 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

INSTANSI

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Visi

: Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas

Misi 1

: Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
				Kebijakan	Program	
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, perjalanan dinas, pengadaan	1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi dan perjalanan dinas.	1.1.1 % Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan perjalanan dinas	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			1.1.2 % Terpenuhiya Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik			
			1.1.3 % Terpenuhiya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional			
			1.1.4 % Lingkungan kantor yg bersih & sehat			
			1.1.5 % Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor			
			1.1.6 % Terpenuhiya Kebutuhan barang Cetak dan Penggandaan			
			1.1.7 % Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			
			1.1.8 % Terpenuhiya Peralatan dan perlengkapan kantor			
			1.1.9 % Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			1.1.10 % Terpenuhiya makanan dan minuman			
			1.1.11 % Terpenuhiya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
			1.1.11 % Meningkatkan pelayanan jasa administrasi / teknis kegiatan			
		1.2 Meningkatkan kuantitas/kualitas pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1.2.1 % Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan kuantitas/kualitas pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			1.2.2 % Tersedianya Peralatan Gedung kantor			
			1.2.3 #REF!			
			1.2.4 % Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor			
			1.2.5 % Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas pejabat			
			1.2.6 % Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas/operasional			
			1.2.7 % Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor			
			1.2.8 % Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor			
			1.3.1 % Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas		Peningkatan disiplin aparatur	
2.	Meningkatkan terub pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.1 Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.1.1 % Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan lkhisar kinerja SKPD	Peningkatan pelaporan capaian kinerja & keuangan SKPD	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			2.1.2 % Terselenggaranya laporan semesteran			
			2.1.3 % Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
 Visi : Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas
 Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
				Kebijakan	Program	
1	Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD	1.1 Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD	1.1.1 % Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun % Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 1.1.1a % Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun % Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 1.1.1b % Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun % Raperda Perhitungan APBD 2010 yg ditetapkan menjadi Perda 1.1.1c % Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun % Raperda Perubahan APBD 2011 yg ditetapkan menjadi Perda 1.1.1d % Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun % Raperda Rancangan APBD 2012 yang ditetapkan menjadi Perda 1.1.2 % Tingkat penyelesaian dokumen perencanaan KUA dan PPA 2011 % Nota Kesepakatan KUA & PPA 2011 yang disepakati Bupati dgn. DPRD 1.1.2a % Tingkat penyelesaian dokumen perencanaan KUA / PPA 2011 % Pembahasan KUA/PPA 2011 yang ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan antara Bupati dan DPRD 1.1.2b % Tingkat penyelesaian dokumen perubahan KUA / PPA 2011 % Perubahan KUA/PPA 2011 yang ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan antara Bupati dan DPRD 1.1.3 % Terlaksananya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.1.4 % Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Perbupma	Peningkatan pemberdayaan aspirasi masyarakat dalam penetapan kebijakan & Perda	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
2.		2.1 Meningkatnya Rekomendasi DPRD kepada Bupati terhadap LKPJ Kepala Daerah	2.1.1. % pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011 2.1.2	Peningkatan Rekomendasi DPRD kepada Bupati terhadap LKPJ Kepala Daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	

1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya profesionalisme dan pelayanan askes Anggota DPRD	3.1 Meningkatkan kualitas kinerja Anggota DPRD	3.1.1. % pelaksanaan kegiatan workshop % Cakupan materi workshop terhadap kebutuhan tugas-tugas Anggota Dewan	Peningkatan profesionalisme Angg. DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Peningkatan kapasitas lembaga pemaidan relay di daerah	
		3.2 Meningkatkan pelayanan askes Anggota dan keluarga Dewan	3.2.1 % Terpenuhinya jaminan kesehatan Anggota Dewan % Reporda yang ditetapkan menjadi Perda	Peningkatan pelayanan askes Anggota & keluarga Dewan		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

INSTANSI

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Visi

: Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas

Misi 3

: Mewujudkan pelayanan dan kemudahan terhadap pemberdayaan aspirasi masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
				Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kelancaran dan kemudahan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan	1.1 Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan reses/ penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja	1.1.1 % pelaksanaan kegiatan reses % Cakupan aspirasi masyarakat yg. di tindak lanjuti	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
			1.1.2 % Capaian kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah % Tersusunnya rumusan kajian hasil kunker			
2.	Meningkatnya sosialisasi perda dan kinerja DPRD	2.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perda dan kinerja DPRD	2.1.1 % Capaian kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan % Cakupan pengetahuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan % Tersedianya informasi kegiatan DPRD bagi Dinas/instansi, Kecamatan, Kel/Desa dan Lembaga pendidikan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perda dan kinerja DPRD		
			2.1.1a %Capaian kegiatan kehumasan& media cetak %Tersedianya informasi kegiatan DPRD bagi Dinas/instansi,Kec,Kel/Desa,Lembaga pend.			

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Misi 1

Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Ket
1	2	3	4
1. Meningkatnya pelayanan administrasi & perjalanan dinas	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	100	
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	
	4. Penyediaan alat tulis kantor	100	
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	
	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	
	9. Penyediaan makan minum	100	
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100	
	11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	100	
2. Meningkatnya kuantitas/kualitas pengadaan/pemeliharaan sarana & prasarana aparatur	1. Pengadaan perlengkapan kantor	100	
	2. Pengadaan peralatan kantor	100	
	3. Pengadaan mebeleur	100	

1	2	3	4
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	
	6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	
	7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	100	
	8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100	
	9. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	100	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Misi 1

Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Ket
1	2	3	4
1. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	100	
	3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Misi 2

Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Ket
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas kinerja Anggota DPRD	1. Workshop DPRD	100	
2. Meningkatkan pelayanan askes Anggota dan keluarga DPRD	1 Penyediaan dana premi asuransi kesehatan	100	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Misi 3

Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Ket
1	5	8	9
Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan reses/penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja	1. Kegiatan Reses	100	
	2. Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	100	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Misi 3

Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Ket
1	5	8	9
1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda dan Kinerja DPRD	1. Kehumasan dan Media cetak	100	

**LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARANS STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD	1.a Input : Dana Output : Pembahasan Raperda Outcome : Penetapan Raperda menjadi Perda 1.b Input : Dana Output : Pembahasan Rancangan APBD 2012 Outcome : - Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pembahasan Rancangan APBD 2012 1.c Input : Dana Output : Perhitungan APBD 2010 Outcome : - Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Perhitungan APBD 2010 1.d Input : Dana Output : Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011 Outcome : - Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011 1.2 Input : Dana Output : Hearing/dialog dan koordinasi dgn. Pejabat Pemda dan tokoh Masy/Agama Outcome : - terealisasinya Kesepakatan KUA dan PPA 2012 serta perubahan KUA & PPAS 2011 yang disepakati Bupati dgn. DPRD 1.3 Input : Dana Output : Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Outcome : terealisasinya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.4 Input : Dana Output : Rapat-rapat paripurna Outcome : Terlaksananya Rapat Paripurna	950,404,480 13 100% 39,989,740 1 100% 34,989,740 1 100% 34,989,740 1 100% 34,989,740 1 100% 59,581,000 2 100% 102,150,000 288 100% 171,151,300 25 100%	941,096,500 13 100% 34,114,500 1 100% 35,114,450 1 100% 36,489,450 1 100% 45,063,000 2 100% 94,450,000 288 100% 112,125,000 25 100%	98.72 % 100 % 100 % 85.31 % 100 % 100 % 100.36 % 100 % 100 % 104.29 % 100 % 100 % 75.63 % 100 % 92.46 % 100 % 100 % 65.51 % 100 % 100 %
2.	Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan reses/penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja	2.1 Input : Dana Output : Kegiatan Reses/Jaring Asmara Outcome : terlaksananya kegiatan reses	2,171,271,300 3 100%	2,170,983,300 3 100%	99.99 % 100 % 100 %

1	2	3	4	5	6
		2.2 Input : Dana Output : Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Outcome : Terlaksanyan Kunker dalam daerah	945,163,200 72 100%	945,163,200 72 100%	100 % 100 % 100 %
3.	Meningkatnya kualitas kinerja Anggota DPRD	3.1 Input : Dana Output : Workshop DPRD Outcome : Terlaksananya kegiatan Workshop	1,819,983,600 9 100%	1,819,983,600 9 100%	100 % 100 % 100 %
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perda dan Kinerja DPRD	4.1 Input : Dana Output : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Outcome : tersebarinya jumlah oplah ke lokasi sasaran media cetak Bag/Dinas/Kantor/Badan Kec/Polsek/Koramil Desa/Kelurahan Parpol/lembaga pendidikan	111,443,400 18000 100%	111,443,400 18000 100%	100 % 100 % 100 %
5.	Meningkatnya pelayanan askes Anggota dan keluarga DPRD	5.1 Input : Dana Output : Penyediaan dana premi asuransi kesehatan Outcome : - Pemenuhan Jaminan Pelayanan Askas Anggota dan keluarga DPRD	184,800,000 170 100%	157,080,000 170 100%	85 % 100 % 100 %
6	Tersusunnya Dokumen Perencanaan tepat waktu	6.1 Input : Dana Output : LKPJ Kepala Daerah Outcome : - Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010	24,296,120 1 100%	24,296,100 1 100%	20 % 100 % 100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 11.925.632.628.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 11.548.337.013.00



**PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan. Merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011.



Lamongan, 1 Januari 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Secretaris,

SEKRETARIAT
DPRD

★ **IR. ABDUL MUNIR, MM** ★

Pemimpin Utama Muda

NHR. 19590901 198803 1 004

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						
a. Pembahasan Raperda	1. Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya pelaksanaan pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD	- Pelaksanaan pembahasan Raperda	4 kali	- Terlaksananya pembahasan Raperda	100 %	862,933,960.00
		- Penetapan Raperda menjadi Perda	13 perda	- Terlaksananya Penetapan Raperda menjadi Perda	100 %	
a1 Pembahasan Raperda		- Pelaksanaan pembahasan Raperda	1 kali	- Terlaksananya pembahasan Raperda	100 %	
		- Penetapan Raperda menjadi Perda	10 Raperda	- Terlaksananya Penetapan Raperda menjadi Perda	100 %	
a2 Pembahasan Rancangan APBD 2012		- Pelaksanaan pembahasan Raperda	1 kali	- Terlaksananya pembahasan Raperda	100 %	
		- Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pembahasan Rancangan APBD 2012	1 Raperda	- Terlaksananya Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pembahasan Rancangan APBD 2012	100 %	
a3 Perhitungan APBD 2010		- Pelaksanaan pembahasan Raperda	1 kali	- Terlaksananya pembahasan Raperda	100 %	
		- Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Perhitungan APBD 2010	1 Raperda	- Terlaksananya Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Perhitungan APBD 2010	100 %	
a4 Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011		- Pelaksanaan pembahasan Raperda	1 kali	- Terlaksananya pembahasan Raperda	100 %	
		- Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011	1 Raperda	- Terlaksananya Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun 2011	100 %	
b. Hearing/dialog dan koordinasi dgn. Pejabat Pemda dan tokoh Masy/Agama		- penyelesaian dokumen pembahasan perubahan KUA / PPA 2011	4 berkas	- terselesaikannya dokumen pembahasan perubahan KUA / PPA 2011 dan.	100 %	59,581,000.00
		- penyelesaian dokumen pembahasan KUA / PPA 2012	2 kesepakatan	- terealisasinya Kesepakatan KUA dan PPA 2012 serta perubahan KUA & PPAS 2011 yang disepakati Bupati dgn. DPRD	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		pelaksanaan 288 kali dengan rincian : Rapat rutin Komisi A B C D Rapat rutin Gabungan Komisi ABCD Rapat Pimp. DPRD, Fraksi & Komisi ABCD Rapat Badan Kehormatan Rapat Badan Legislasi Rapat Komisi ABCD dgn. Eksekutif Rapat Alat Kelengkapan Lainnya	96 kali 12 kali 24 kali 48 kali 48 kali 48 kali 12 kali	terlaksananya Rapat rutin Komisi A B C D Rapat rutin Gabungan Komisi ABCD Rapat Pimp. DPRD, Fraksi & Komisi ABCD Rapat Badan Kehormatan Rapat Badan Legislasi Rapat Komisi ABCD dgn. Eksekutif Rapat Alat Kelengkapan Lainnya	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	102,150,000.00
d.	Rapat-rapat paripurna		Pelaksanaan Rapat Paripurna	24 kali	Terlaksananya Rapat Paripurna	100 %	209,178,600.00
e.	Kegiatan Reses/ Jaring Asmara	4. Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan reses/penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja	pelaksanaan kegiatan reses Peserta reses Daerah pemilihan yg. dikunjungi Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	3 kali 50 org 5 dapil 100 %	terlaksanya kegiatan reses Peserta reses Daerah pemilihan yg. dikunjungi Cakupan aspirasi masyarakat yg. ditindaklanjuti	100 % 100 % 100 % 70 %	2,171,271,300.00
f.	Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah		Pelaksanaan Kunker dalam daerah Peserta reses Kunker dalam daerah	72 kali 50 org	Terlaksananya Kunker dalam daerah dengan jumlah Peserta yg. mengikuti kunker	100 % 100 %	945,163,200.00
g.	Workshop DPRD	2. Meningkatnya kualitas kinerja Anggota DPRD	- Pelaksanaan kegiatan Workshop dengan jumlah peserta workshop	9 kali 50 org	Terlaksananya kegiatan Workshop dengan jumlah peserta workshop	100 % 100 %	1,819,983,600.00
h.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perda dan Kinerja DPRD	jumlah oplah lokasi sasaran media cetak Bag/Dinas/Kantor/Badan Kec/Polsek/Koramil Desa/Kelurahan Parpol/lembaga pendidikan Ponpes Lain-lain	18,000 exp/th 72 kantor 27 kantor 472 kantor 55 kan/sek 206 ponpes	tersebar nya jumlah oplah ke lokasi sasaran media cetak Bag/Dinas/Kantor/Badan Kec/Polsek/Koramil Desa/Kelurahan Parpol/lembaga pendidikan Ponpes Lain-lain	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	111,443,400.00
i.	Penyediaan dana premi asuransi kesehatan	3. Meningkatnya pelayanan askes Anggota dan keluarga DPRD	- Pemenuhan Jaminan Pelayanan Askes Anggota dan keluarga DPRD - Pemenuhan Jaminan Pelayanan Askes Anggota dan keluarga DPRD	200 jiwa 12 kali 200 jiwa 1 kali	Terpenuhinya jaminan pelayanan askes Anggota dan keluarga DPRD Terpenuhinya jaminan pelayanan askes Anggota dan keluarga DPRD	100 % 100 % 100 % 100 %	184,800,000.00

LKPJ Kepala Daerah	6 Tersusunnya Dokumen Perencanaan tepat waktu	- Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 - LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010	1 kali 1 berkas	- Terlaksananya LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010 - Terlaksananya LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2010	100 % 100 %	24,296,120.00
--------------------	---	--	--------------------	--	----------------	---------------

Menyetujui

